

## SOLIDARITAS INTELEKTUAL MUDA TAMBRAUW CINTA DAMAI

No : 01/FAMT/SPR/V/202

Sifat : Terbuka

Perihal : Mohon Pembatalan Pembangunan/Tidak Membangun KODIM Tambrauw

### **Kepada Yang Terhormat :**

1. Presiden RI, Ir. Joko Widodo;
2. Panglima TNI, Marsekal. Hadi Tjahjanto

Salam Hormat,

Semoga pandemi Covid 19 (Corona) yang melanda negeri kita tercinta ini dapat kita atasi bersama dan kita dapat kembali membangun bangsa untuk maju ke depannya.

**Solidaritas Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai** adalah merupakan wadah informal anak-anak muda Tambrauw yang dibentuk sebagai wadah koordinasi antar anak-anak muda dalam menyikapi dinamika sosial masyarakat Tambrauw dalam era pembangunan dan modernisasi saat ini.

### **Bapak Presiden dan Panglima TNI Yang Terhormat,**

Saat ini di bawah komando Bapak Berdua semua warga Indonesia termasuk kami warga Tambrauw sedang berjuang melawan wabah Covid 19, suatu perjuangan yang mewajibkan kekompakan kerja antar semua elemen anak bangsa. Semangat itu pun yang saat ini kami warga Tambrauw lakukan di bawah bimbingan Pemerintah Daerah kami Kabupaten Tambrauw. Namum Bapak Presiden dan Panglima, disaat kami warga Tambrauw sedang melaksanakan perintah Pemerintah dengan tetap dan atau bekerja di rumah saja sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran wabah Covid 19, kami dikagetkan dengan datangnya sejumlah anggota TNI AD menempati sebuah gedung Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Wembru Sausapor yang dulunya digunakan sebagai Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tambrauw, pada Januari/ Februari 2020. Keberadaan sejumlah anggota TNI tersebut disusul pemasangan sebuah baliho di depan kantor tersebut dengan tulisan KODIM (Komando Distrik Militer) Tambrauw. Sama halnya, KORAMIL (komando Rayon Militer) Distrik Kwoor pun dibangun semenjak bulan Februari 2020.

Kami pun telah melakukan penelusuran dan kami mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat pada Tahun 2020 ini akan dilakukan peresmian KODIM Tambrauw, dan para anggota TNI yang ditempatkan tersebut sebagai bagian dari anggota KODIM Persiapan Tambrauw. Keberadaan anggota TNI di Kantor Pemerintah dimaksud dan pembangunan KODIM di daerah kami tanpa ada pemberitahuan kepada kami warga Tambrauw secara umum dan lebih khusus kepada pemilik hak ulayat dan warga Abun suku setempat, adalah hal yang aneh bagi kami karena terkesan dilakukan secara tertutup. Padahal kami ini manusia dan alasan keberadaan TNI di daerah kami ini karena untuk mengamankan pembangunan jadi mestinya harus disosialisasikan kepada kami sebagai manusia-manusia yang menjadi subjek pembangunan dan adanya KODIM dimaksud, dan harus ada kesepakatan dengan kami Masyarakat Tambrauw, khususnya para Pemilik hak ulayat.

**Bapak Presiden dan Panglima Yang Terhormat,**

Keberadaan anggota TNI di Kantor dimaksud dengan tujuan pembagunan KODIM membuat kami warga Tambrauw resah dan ketakutan, karena kami takut dengan keberadaannya sejumlah anggota TNI, apalagi kedepannya pasti personil untuk KODIM Tambrauw akan ditambah dalam jumlah banyak.

**Bapak Presiden dan Panglima Yang Terhormat,**

Kami tidak benci TNI tetapi kami tidak ingin tinggal berdampingan dengan TNI. Bapak Presiden dan Panglima, kami memiliki massa lalu yang buruk dengan TNI. Hingga kini sebagian generasi tua kami masih hidup dalam troma kekerasan militer massa lalu yang dilakukan oleh ABRI dalam operasi militer pada Tahun 1970-an dan juga semenjak ditempatkannya Satuan Tugas (Satgas) TNI di beberapa Distrik di Kabupaten Tambrauw seperti Distrik Kebar, Meyah, Fef dan atau beberapa Distrik lainnya pada Tahun 2012 sampai hingga kini, lebih khusus aparat TNI yang ditugaskan semenjak 2015 untuk mengamankan pembagunan jalan Trans Nasional Papua Barat: Manokwari - Sorong, telah terjadi kekerasan militer (TNI) terhadap warga setempat. Kami telah mengalami dan merasakan secara langsung, melihat dan mendengar berbagai kekerasan yang sering terjadi terhadap warga kami yang dilakukan oleh TNI. Itu lah pengalaman hidup kami yang mendasari kami tidak ingin hidup berdampingan dengan militer (kami tidak ingin adanya KODIM di daerah kami).

**Bapak Presiden dan Panglima Yang Terhormat,**

kami ingin tetap hidup tentram dan damai di Kampung dan Daerah kami. Selama ini daerah kami aman-aman saja. Semenjak Kabupaten Tambrauw dimekarkan dan bahkan jauh sebelumnya kami warga Tambrauw hidup damai-damai saja. Di sini tidak ada satu pun musuh negara yang harus ditumpas oleh TNI, tidak ada juga kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis, bahkan tidak pernah terjadi konflik sosial diantara sesama kelompok masyarakat yang mengganggu keamanan warga atau menghalangi pembangunan. Kondisi damai ini membuat kami sangat nyaman dan hidup bersahaja diantara sesama warga.

**Bapak Presiden dan Panglima Yang Terhormat,**

Kami tidak mau daerah kami sama seperti daerah lainnya di Papua seperti Nduga, Paniai, Deyai, Intan Jaya, Timika yang kini sering terjadi kekerasan militer, yang disebabkan adanya militer di daerah-daerah dimaksud. Bukan rahasia lagi bahwa berbagai kekerasan di Papua yang berujung pelanggaran HAM itu dilakukan oleh aparat negara seperti TNI dan POLRI. Dari berbagai laporan HAM yang kami pelajari TNI memiliki catatan kelam yang tinggi dalam kekerasan terhadap masyarakat Papua.

Tugas Pokok TNI dalam UU TNI no 24/2004 adalah pertahanan, yaitu tugas melakukan perang di dalam maupun di luar negeri dan menjaga wilayah perbatasan NKRI. TNI tidak mempunyai tugas pokok untuk mengurus pembagunan daerah atau menjaga keamanan daerah (dalam negri). Itu lah ketika KODIM mau dibangun dengan dalil untuk mengamankan pembangunan, seperti yang diungkapkan oleh Danrem 181 PVT Sorong Brigjen Yulius Selvanus dalam kunjungannya ke Sausapor Tambrauw pada 12 Februari 2020, bertentangan sekali dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan Negara Indonesia.

**Bapak Presiden dan Panglima Yang Terhormat,**

Warga Tambrauw bukan musuh TNI, namun warga Tambrauw semuanya merupakan warga Negara Indonesia. Pembangunan di Kabupaten Tambrauw bukan tugas TNI, tetapi pembangunan Kabupaten Tambrauw sepenuhnya dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan warga Tambrauw, sedangkan tugas

keamanan warga Tambrauw sudah merupakan tugas wajib POLRI. Jadi tanpa KODIM Tambrauw dan KORAMIL Kwoor kami warga Tambrauw tetap hidup tentram dan damai, dan kami tetap dapat membangun daerah kami maju dan bersaing sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Oleh sebab itu, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas tentang kondisi keamanan daerah dan warga Tambrauw dan urgensi pembangunan. KODIM dan KORAMIL, maka melalui surat terbuka ini kami mohon kepada pabak Presiden Ir. joko Widodo dan Masekal TNI. Hadi Tjohjanto agar tidak membangun KODIM Kabupaten Tambrauw di Tambrauw dan KORAMIL di Distrik Kwor.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sausapor, 06 Mei 2020  
Solidaritas Inteletual Mudah Tambrauw Cinta Damai

Kami Solidaritas Intelektual Mudah Tambrauw Cinta Damai yang nama-namanya disebutkan di bawah ini :

1. Pitet Mambrasar Mambrasar, Amd. Hut (Pemuda);
2. Bertho Yekwam (Mahasiswa);
3. Paul Baru, ST, MT (Tokoh Pemudah);
4. Yohanis Mambrasar, S. H., (Aktivis HAM)
5. Festus Yesnath, S. Pd (Pemilik Hak Ulayat dan Tokoh Pemudah);
6. Feliks Yenjau (Pemilik hak ulayat);
7. Soter Hai (Pemerhati Masyarakat Adat dan Lingkungan);
8. Abraham Yekwam (Tokoh Pemudah);
9. Mesak Wanma, S. E (Pemerhati Sosial);
10. Natalis Yewen (Pemudah);
11. Lewi Yenjau (Mahasiswa);
12. Yance Yenath (Mahasiswa);
13. Martinus Mambrasar (Penuda/Guru Jemaat);
14. Roi Yesnath (Pemudah);
15. Piter Yappen (Mahasiswa);
16. Decler Yesnath (Pemerhati Lingkungan);
17. Musa Mambrasar, S. H (Praktisi Sosial);
18. Isak Wanma, S. Th (Pemudah)
19. Otto Wanma, S.T (Pemerhati Lingkungan)
20. Yustus Yekwam (Mahasiswa)
21. Maximus Sedik (Mahasiswa);

*Nara Hubung: Piter Mambrasar (HP: 081347888317/081221611871)*